

**PERAN KEPALA DESA DALAM
MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT DESA
DITINJAU SIYASAH DUSTURIYAH**
(Studi terhadap kebijakan pengentasan kemiskinan di Desa Way
Huwi Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam IlmuSyari'ah

Oleh

ADE DIO DIVALDHY
NPM: 1721020123

Program Studi: Hukum Tata Negara (SiyasahSyar'iyyah)



FAKULTAS SYARI'AH
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
2021 M / 1442 H

**PERAN KEPALA DESA DALAM
MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT DESA
DITINJAU SIYASAH DUSTURIYAH**
(Studi terhadap kebijakan pengentasan kemiskinan di Desa
Way Huwi Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam IlmuSyari'ah

Pembimbing I : Dr. Efa Rodiah Nur,M.H.

Pembimbing II : Dr. H. Yusika Sumanto LC. M.ED

Oleh

ADE DIO DIVALDHY
NPM: 1721020123

Program Studi: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyyah)

FAKULTAS SYARI'AH
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H / 2021 M

ABSTRAK

Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam prinsip desentralisasi dan otonomi daerah, dapat dilihat dari meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa. Kepala Desa berperan dalam mengimplementasikan pemerintahan desa sesuai dengan yang diatur oleh undang-undang tentang pemerintahan desa. Kepala desa bertanggung jawab atas kemajuan desanya guna mencapai masyarakat yang sejahtera sesuai dengan visi dan misi desa. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana peran Kepala Desa Way Huwi dalam pelaksanaan pembangunan desa dalam upaya mensejahterakan masyarakat desa melalui kebijakan pengentasan kemiskinan di desa Way Huwi Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan, serta tinjauan siyasah dusturiyah terhadap upaya kepala desa dalam mensejahterakan masyarakat desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran kepala desa dalam mensejahterakan masyarakat desa melalui kebijakan pengentasan kemiskinan di desa Way Huwi kecamatan Jati Agung Lampung Selatan. Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) dengan sifat deskriptif-analisis yaitu dengan cara menganalisis data yang diteliti dengan memaparkan data-data kemudian nantinya diperoleh kesimpulan. Adapun data yang diperoleh dari data primer melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen, sedangkan data sekunder diperoleh melalui kepustakaan, hasil-hasil penelitian, Al-Quran dan hadist dan peraturan perundang-undangan serta buku-buku ilmiah lainnya. Data-data yang sudah didapat kemudian dianalisa secara sistematis untuk menunjang dalam pembahasan. Selanjutnya dianalisis kualitatif dengan metode deskriptif analisis yang menghasilkan metode induktif dengan cara berfikir dengan diambil kesimpulan didasarkan atas fakta-fakta yang telah diperoleh. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa Kepala Desa Way Huwi sebagai kepala penyelenggara pemerintahan desa telah memberikan segenap upaya untuk mensejahterakan masyarakat desa melalui implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan yang bersumber dari anggaran dana desa yang telah disediakan oleh pemerintah pusat, kebijakan tersebut berupa bantuan langsung tunai (BLT) yang sudah terselenggara dengan baik sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan juga pengentasan kemiskinan yang berlandaskan AL-Quran dan Hadist.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Letkol. Hendro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Tlp (0721) 703260

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ade Dio Divaldhy

NPM : 1721020123

Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: “Peran Kepala Desa Dalam Mensejahterakan Masyarakat Desa Ditinjau Dalam Siyasah Dusturiyah (Studi Terhadap Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Didesa Way Huwi Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan)”. Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 14-06-2021
Penulis,



Ade Dio Divaldhy
NPM. 1721020123



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Letkol. Hendro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Tlp (0721)703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : “Peran Kepala Desa Dalam Mensejahterakan Masyarakat Desa Ditinjau Dalam Siyasah Dusturiyah (studi Terhadap Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Didesa Way Huwi Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan)”

Nama : Ade Dio Divaldhy
NPM : 1721020123
Jurusan : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang
Munaqosah Fakultas Syari'ah Universitas Islam
Negeri Raden Intan Lampung**

Bandar Lampung, 14 Juni 2021

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H
NIP. 1969080819032002

Dr. H. Yusika Sumanto, LC., M.ED
NIP.

**Mengetahui
Ketua Jurusan Siyasah**

Frenki, M.S.I
NIP. 19800315200911017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**


Jl. Lelekol. Hendro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Tlp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : "Peran Kepala Desa Dalam Mensejahterakan Masyarakat Desa Ditinjau Siyasah Dusturiyah (studi terhadap kebijakan pengentasan kemiskinan di Desa Way Huwi Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan)" oleh: Ade Dio Divaldhy, NPM:1721020123, Jurusan: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah), telah di ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari'ah pada Hari/Tanggal: Jum'at/02 Juli 2021

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H. 

Sekretaris : Rudi Santoso, MHI.,MH 

Penguji Utama : Drs. Henry Iwansyah, M.A. 

Penguji I : Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. 

Penguji II : Dr. H. Yusika Sumanto LC. M.ED 

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah**



Dr. H. Khoirudin, M.H.

NIP. 196210211993031002

MOTTO

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ۚ اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى
وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

(Q.S AL-Maidah(5):8)

PERSEMBAHAN

Karya yang sederhana ini kupersembahkan kepada mereka yang berarti dikehidupanku:

1. Kedua orang tuaku yang kusayangi dan kubanggakan, Ayahanda (Suhaimi,S.sos.,M.I.Kom.) dan Ibunda (Marlina,A.Md) yang tidak pernah lelah dalam medoakan dan menyayangiku atas segala pengorbanan dan kesabaran yang membuatku tumbuh hingga hari ini. Ucapan terimakasih tidak akan pernah cukup untuk membalas segalanya. Karena itu karya ini sebagai bentuk bakti dan cinta kepada ayah dan ibu.
2. Kakakku Dennis Balkhopa,S.I.Kom. yang selalu memberikan dukungan dan semangat serta bimbingan yang selalu kubutuhkan.
3. Yuliani Afrilia, S.T. yang selalu hadir dan menemani serta selalu mendukung apapun pilihanku.
4. Sahabat-sahabatku, Aldo, Al-qutbi, David, Galih, Daffa, Sultan, Rangga, Deni, Indra, Rezaldi, Rizki sebagai teman seperjuangan dan teman diskusi untuk terus tumbuh menjadi dewasa. Dan juga teman seperjuangan Siyasah (F), Kelompok 43 PPS 2020, kelompok KKN-DR 2020 desa Way Huwi. Dan juga yang tidak bisa kusebut satu persatu, yang selalu memberikan semangat dan dukungan pada penulisan skripsi ini.
5. Dosen pembimbing yang senantiasa dengan sabar membimbing dalam pembuatan serta penyertaan skripsi ini.
6. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Ade Dio Divaldhy dilahirkan dikota Palembang, sumatera selatan pada tanggal 11 Desember 1998, merupakan anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Suhaimi,S.sos,.M.I.Kom. dan Ibu Marlina,A.Md. Penulis menyelesaikan pendidikan di TK Dharma Wanita, Kec. Sukarame Kota Bandar Lampung lulus pada tahun 2005. Sekolah Dasar Negeri 2 Harapan Jaya, kec.sukarame Kota Bandar Lampung lulus pada tahun 2011. Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Kota Bandar Lampung lulus pada tahun 2014. Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Kota Bandar Lampung lulus pada tahun 2017. Pada tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikan strata 1 diperguruan tinggi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syariah Program studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syari'iyah).

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirohim

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan hidayah ilmu pengetahuan, kekuatan dan petunjuknya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam tidak lupa penulis panjatkan kepada baginda nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita umatnya dari zaman kegelapan dan kebodohan zaman terang-menerang yang diridhai Allah SWT.

Judul skripsi ini “Peran Kepala Desa Dalam Mensejahterakan Masyarakat Desa Ditinjau Siyasah Dusturiyah (studi terhadap kebijakan pengentasan kemiskinan Di Desa Way Huwi Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan)”. Penulisan skripsi ini disusun guna memenuhi dan melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Hukum Tata Negara (Siyasah), pada program strata satu (S1) fakultas syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Proses penyelesaian skripsi ini banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan, serta saran dari banyak pihak, untuk itu izinkan penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si. selaku ketua Jurusan Siyasah UIN Raden Intan Lampung.
4. Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku pembimbing I dan Dr. H. Yusika Sumanto LC. M. ED. Selaku pembimbing II, yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Bapak dan ibu dosen fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di fakultas syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
6. Pimpinan perpustakaan dan karyawannya, baik perpustakaan pusat maupun perpustakaan fakultas, yang telah memberikan

bantuan dalam meminjamkan buku-buku sebagai bahan literature dalam penulisan skripsi ini.

7. Desa Way Huwi Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan yang telah memberikan kesempatan untuk penulis melaksanakan serangkaian penelitian.
8. Kepala desa beserta perangkat desa, tokoh agama, tokoh masyarakat serta masyarakat desa Way Huwi Kecamatan Jati Agung Lampung selatan yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini.
9. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis akan mendapatkan balasan oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak sekali kekurangan, oleh sebab itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis butuhkan untuk menyempurnakannya. Namun penulis juga berharap bahwa karya tulis ini dapat bermanfaat baik bagi penulis pribadi atau para pembaca pada umumnya.

Bandar Lampung, 30 April 2021
Penulis

Ade Dio Divaldhy
1721020123

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasaan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Kegunaan Penelitian.....	7
F. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	7
G. Metode Penelitian	9
H. Kerangka Teoritik.....	12

BAB II LANDASAN TEORI

A. Konsep Siyasah Dusturiyah.....	15
1. Pengertian Siyasah Dusturiyah.....	15
2. Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah.....	17
B. Teori Kepemimpinan	19
1. Profil Kepemimpinan Nabi Muhammad SAW	21
2. Indikator Kepemimpinan Islam	23
3. Peran Pemimpin Dalam Pengambilan Keputusan	23
C. Tingkat Kemiskinan Sebagai Parameter Kesejahteraan Masyarakat	24

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Way Huwi	31
1. Profil Desa.....	31
2. Kondisi Geografis	35
3. Kondisi Pendidikan Dan Perekonomian	37
4. Kondisi Sosial Desa Way Huwi	40
B. Pelaksanaan Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Didesa Way Huwi Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan	43
C. Teknis Pemyelenggaraan Bantuan Langsung Tunai	46

BAB IV ANALISIS DATA

A. Peran Kepala Desa Dalam Mensejahterakan Masyarakat Desa	55
B. Tinjauan Siyasa Dusturiyah Terhadap Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Di Desa Way Huwi	60

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	65
B. Saran	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1 Data Sejarah Kepemimpinan Desa Way Huwi	33
2. Tabel 2 Perincian Data RT Tahun 2021 Berdasarkan Dusun Dan Lokasi	35
3. Tabel 3 Tata Guna Tanah Desa Way HUwi	36
4. Tabel 4 Perincian Data Penduduk Desa Way Huwi Berdasarkan pendidikan Secara Umum	37
5. Tabel 5 Perincian Data Penduduk Desa Way Huwi Berdasarkan Mata Pencaharian	38
6. Tabel 6 Perincian Data Gizi Pada Balita Desa Way Huwi	40
7. Tabel 7 Perincian Data Penduduk Menurut Agama Dan Kepercayaan Terhadap YME	41
8. Tabel 8 Perincian Data Penerima Bantuan Langsung Tunai Desa Way Huwi	51

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan judul

Untuk memahami judul skripsi ini, penulis akan lebih dahulu mengemukakan istilah-istilah yang terkandung pada skripsi ini. Adapun judul skripsi ini adalah **“Peran Kepala Desa Dalam Mensejahterakan Masyarakat Desa Ditinjau Siyasah Dusturiyah (Studi Terhadap Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Di Desa Way Huwi Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan)”**. Adapun hal-hal penting yang berhubungan dengan judul tersebut adalah:

1. Peran menurut kamus bahasa Indonesia diartikan sebagai pemain sandiwara, perangkat tingkah yang di harapkan di miliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat¹.
2. Kepala desa/adat yang disebut dengan nama lain kepala pemerintah desa/adat yang memimpin penyelenggaraan desa².
3. Mensejahterakan adalah membuat sejahtera: menyelamatkan (mengamankan dan memakmurkan dan sebagainya)³.
4. Masyarakat desa adalah masyarakat yang tinggal di suatu kawasan, wilayah , territorial tertentu yang di sebut desa.
5. Tinjauan adalah hasil peninjau pandangan pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya)⁴.
6. Fiqh siyasah adalah salah satu aspek hukum yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan manusia itu sendiri⁵.
7. Kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau oleh kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mecapai tujuan tersebut⁶.

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

² Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 25.

³ *Ibid.*

⁴ Departemen pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi kedua, (Jakarta: balai pustaka, 1991).

⁵ Muhammad Iqbal, *fiqh siyasah kontekstualisasi doktrin politik*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014),h. 4.

⁶ Mirriam Budiharjo, *dasar-dasar ilmu politik* , (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,1992), h.12.

8. Pengentasan kemiskinan adalah seperangkat tindakan, baik ekonomi maupun kemanusiaan, yang dimaksudkan untuk mengangkat orang keluar dari kemiskinan secara permanen⁷.

Maka dengan uraian di atas dapat disimpulkan skripsi ini adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui peran kepala desa dalam mensejahterakan masyarakat desa (studi terhadap pengentasan kemiskinan di Desa Way Huwi Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan).

B. Latar belakang masalah

Sistem desentralisasi dalam negara Indonesia atau dikenal dengan nama otonomi daerah adalah wacana yang hangat untuk dibicarakan dan diperdebatkan karena menyangkut bagaimana upaya Negara dalam mensejahterakan rakyat.

Pengertian otonomi daerah menurut Undang-undang No.32 tahun 2004 adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁸

Pada prinsipnya penyelenggaran pemerintahan dalam rangka desentralisasi dan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena dalam melaksanakan otonomi daerah dan desentralisasi telah diberikan ruang yang cukup untuk melaksanakan kerjasama antara daerah yang didasarkan pada prinsip efesiensi dan efektifitas.⁹

Kesejahteraan merupakan suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, materi, maupun spriritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir dan batin yang memungkinkan setiap warga Negara untuk mengadakan usaha-usaha

⁷ Pengertian Pengentasan Kemiskinan “ (Online), Tersedia di: https://id.wikipedia.org/wiki/Pengentasan_kemiskinan (30 agustus 2020).

⁸ Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 ayat (5).

⁹ Ahmad Surkati, ” Otonomi Daerah Sebagai Instrumen Pertumbuhan Kesejahteraan dan Peningkatan Kerjasama antar Daerah”. *Jurnal Mimbar* 28, no. 1,(2012),1.

pemenuhan kebutuhan jasmani, dan sosial dan sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat.¹⁰

Masalah kemiskinan dan kaum fakir bukanlah masalah baru. Sejak dulu berbagai agama dan filsafat berubapaya untuk memecahkan masalah kemiskinan yang ada di tengah masyarakat untuk mengakhiri penderitaan kaum fakir. Di Negara-negara berkembang kemiskinan bahkan hampir tanpa disadari dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan kemiskinan seolah menjadi kehidupan yang biasa terjadi di Negara-negara berkembang atau yang disebut dengan dunia ketiga.

Indonesia memiliki struktur di dalam masyarakat, struktur tersebut berbentuk secara vertikal, dengan ditandai dengan adanya perbedaan-perbedaan vertikal berupa lapisan atas dan lapisan bawah, agraris dan industri.¹¹

Bagi Indonesia, upaya pengentasan kemiskinan dewasa ini sangat penting karena bank dunia telah menyimpulkan bahwa kemiskinan di Negara kita bukan hanya sekedar 10-20% penduduk yang hidup dalam kemiskinan absolut (*extreme poverty*); tetapi ada kenyataan yang lain yang membuktikan bahwa kurang lebih tiga per lima atau 60% penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan.¹²

Ada banyak faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya rantai kemiskinan yang secara terus menerus terjadi di tengah masyarakat salah satunya adalah rendahnya faktor pendidikan. Implikasi dari kemiskinan itu sendiri dapat mempengaruhi kehidupan keseluruhan aspek kehidupan manusia. Oleh sebab itu secara singkat kemiskinan dapat didefinisikan dengan sebagai suatu standar kehidupan yang rendah.

¹⁰ Notowidigdo Rohiman, *Pengantar Kesejahteraan Sosial Berwawasan Iman dan Taqwa* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 67.

¹¹ Efa Rodiah Nur, "Dialektika Ilmu Hukum Indonesia Dalam Domiasi Positivisme Ilmu Hukum (Suatu Pergeseran Paradigma Ilmu Hukum Indonesia Dari Teks Menuju Realitas Hukum Yang Berkeadilan)". *Jurnal ASAS* 9, no.1 (2017): 33.

¹² Totok Mardikanto, Poerwoko Soebianto, *Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik* (Bandung, Alfabeta, 2012) h. 25.

Berdasarkan undang-undang nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin, bahwa pada pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian akan tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan layak bagi kehidupan dirinya maupun keluarganya.

Hadist tentang orang miskin yang sesungguhnya;

لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ تَرْدُهُ اللَّقْمَةُ وَالْقَمَتَانِ، وَالْتَّمَرَةُ
وَالْتَّمَرَتَانِ، وَلَكِنَّ الْمِسْكِينَ الَّذِي لَا يَجِدُ غِنًى يَغْنِيهِ، وَلَا يَقْطُرُ لَهُ
فَيَتَصَدَّقُ عَلَيْهِ، وَلَا يَقُومُ فَيَسْأَلُ النَّاسَ. (رواه الشيخان)

“Orang yang benar-benar miskin itu bukanlah seseorang yang berkeliling meminta-minta kepada orang lain, lalu ia pergi setelah di beri sesuap atau dua suap makanan, dan sebiji atau dua biji buah kurma. Tetapi orang yang benar-benar miskin itu ialah orang yang tidak memiliki kecukupan yang menjaminkannya, dan keadaannya pun tidak di ketahui sehingga tidak di beri sedekah, dan ia pun tidak mau bangkit untuk meminta-minta kepada orang lain.”

¹³ (HR. Imam Bukhari dan Muslim).

Posisi desa yang berada di garis terdepan dalam pelayanan mengayomi masyarakat akan sangat mempengaruhi penampilan pemerintahan yang ada di atasnya. Suksesnya pemerintahan desa dalam menjalankan kegiatan-kegiatan program pembangunan desa merupakan gambaran sukses juga pemerintahan kecamatan, kabupaten dan provinsi bahkan pemerintahan pusat, karena pembangunan desa merupakan bagian integral pembangunan nasional.

Karena sistem desentralisasi setiap daerah diberikan hak, wewenang dan kewajiban kepada daerah otonom dari jabatan yang

¹³ Sayyid Ahmad Al-Hasyimi, *Syarah Mukhtaarul Ahaadits*, (Bandung, Sinar Baru Algensindo, 2003) h.738.

paling tinggi hingga ke yang paling rendah. Salah satunya adalah peranan kepala desa yaitu sesuai dengan UU No.22 Tahun 1999 pasal 101 adalah : 1.Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa; 2.Membina kehidupan masyarakat desa; 3.Membina perekonomian desa; 4.Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa; 5. Medamaikan perselisihan masyarakat desa;dan 6. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya.¹⁴

Dewasa ini kita masih banyak melihat kemiskinan masih terjadi di penjuru desa di Indonesia, oleh sebab itu penulis ingin melihat bagaimana peranan kepala desa dalam mensejahterakan masyarakat desa khususnya di desa Way Huwi Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan, apakah sudah sesuai dengan yang tercantum pada UU No.22 tahun 1999 pasal 101 tentang pemerintahan daerah.

Kepala Desa Way Huwi sebagai pemimpin Desa Way Huwi Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan memiliki kewajiban dan wewenang dalam melaksanakan kegiatan pembangunan desa dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat desa dan menekan angka kemiskinan yang ada di Desa Way Huwi Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan, Salah satunya dengan menggunakan kebijakan pengentasan kemiskinan demi terciptanya masyarakat yang sejahtera.

Upaya pengentasan kemiskinan melalui bantuan langsung tunai (BLT) yang bersumber dari dana desa pada pelaksanaan di lapangan masih memiliki masalah pada penyaluran dana tersebut. Seperti sasaran penerima bantuan langsung tunai (BLT) adalah orang-orang yang berkategori sangat miskin, miskin, hampir miskin namun faktanya masih banyak orang kaya, atau orang yang masih dikategorikan sebagai orang mampu justru menerima bantuan tersebut, sedangkan masih banyak masyarakat miskin yang seharusnya mendapatkan dana tersebut justru tidak mendapatkannya.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 101.

Selain salah target pada pelaksanaan kebijakan pengentasan kemiskinan melalui bantuan langsung tunai (BLT) kendala yang terjadi di lapangan adalah pelaksanaan pencairan dana (BLT) tersebut sering tidak sesuai, dana (BLT) yang seharusnya cair 3 kali per KPM perempat bulan dalam setahun, namun kenyataannya tidak demikian dana yang diterima oleh masyarakat hanya sekali. Untuk itu penulis melakukan penelitian untuk melihat peran Kepala Desa Way Huwi dalam memenuhi hak-hak masyarakat desa melalui kebijakan pengentasan kemiskinan.

Namun apakah peranan kepala desa dalam mensejahterakan masyarakat desa melalui kebijakan pengentasan kemiskinan dapat dengan baik terimplementasi. Implementasi kebijakan secara sederhana dapat diartikan sebagai proses menerjemahkan peraturan kedalam bentuk tindakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis karena wujudnya intervensi berbagai kepentingan¹⁵.

C. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis akan memaparkan rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Kepala Desa Way Huwi dalam pelaksanaan pembangunan desa dalam upaya mensejahterakan masyarakat desa melalui kebijakan pengentasan kemiskinan di Desa Way Huwi kecamatan Jati Agung Lampung Selatan?
2. Bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah dalam kebijakan pengentasan kemiskinan di desa Way Huwi Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan?

D. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui peran Kepala Desa Way Huwi dalam pelaksanaan pembangunan desa dalam upaya mensejahterakan masyarakat desa melalui kebijakan pengentasan kemiskinan di Desa Way Huwi Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan.

¹⁵ Leo Agustino, *Dasar-dasar kebijakan publik* (Bandung, Alfabeta, 2017), h.126.

2. Untuk mengetahui tinjauan siyasah dusturiyah dalam kebijakan pengentasan kemiskinan di Desa Way Huwi kecamatan Jati Agung Lampung Selatan.

E. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Kegunaan secara teoritis yaitu sebagai ilmu pengetahuan kepada pembaca untuk mengetahui bagaimana peran Kepala Desa dalam kebijakan pengentasan kemiskinan ditinjau dari Siyasah Dusturiyah.
2. Kegunaan praktis yaitu untuk memperluas wawasan penulis dalam memenuhi tugas akhir sebagai mahasiswa (UIN) universitas islam negeri Raden intan Lampung.

F. Kajian penelitian terdahulu yang relevan

Tinjauan pustaka adalah serangkaian uraian sistematis terhadap hasil penulisan terdahulu (*preliminary research*) tentang permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi.

Penulis telah melakukan penelusuran di perpustakaan UIN Raden Intan Lampung, adapun penulis menemukan beberapa judul yang membahas tentang peran kepala desa, selain itu penulis juga melakukan penelusuran di beberapa platform, hasilnya penulis mendapatkan beberapa karya ilmiah yang memiliki tema yang mirip terhadap penulisan ini, antara lain:

1. Siti Rahayu dengan judul skripsi “ *Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Untuk Mensejahterakan Masyarakat Perspektif Politik Islam (Studi di Desa Kaliguwo Kecamatan Kaliwiro Wonosobo)* ”skripsi ini, membahas tentang keberhasilan suatu pembangunan menjadi suatu tolak ukur kesejahteraan bagi masyarakat di desa. Sebuah desa yang maju dapat dilihat dari sarana dan prasarana yang memadai. Kepala

desa dalam menjalankan kewajibannya sebagai Kepala Desa memiliki tanggung jawab yang besar terhadap kesejahteraan.¹⁶

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), data-data pada penelitian ini dianalisis menggunakan analisis kualitatif melalui metode yang bersifat deskriptif analisis. Kesimpulan pada skripsi ini adalah Peran Kepala Desa Kaliguwo periode 2015/2019 dalam pelaksanaan pembangunan pada sektor ekonomi, pendidikan, infrastruktur, kesehatan mampu melakukan tugasnya dengan baik dan mampu mempertanggungjawabkan amanah dan kewajibannya sebagai seorang pemimpin.¹⁷ Persamaan penelitian ini dan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti tentang Peran Kepala Desa dalam mensejahterakan masyarakat desa, sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini meneliti pelaksanaan pembangunan desa dan penelitian penulis membahas tentang pengentasan kemiskinan dan hubungan timbal balik antara Kepala Desa dan masyarakat desa.

2. Lisa Oktavia dengan judul skripsi “*Tinjauan Fiqh Siyasah Dan Undang-Undang Desa Terhadap Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan* (Studi di Desa Penggawa V Ulu Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir barat)” skripsi ini membahas tentang sebuah keberhasilan suatu desa dilihat dari sarana dan prasarana yang memadai, hal itu dapat terjadi karena Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan memiliki tanggung jawab yang besar dalam memajukan desanya guna menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.¹⁸

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analisis, penelitian ini menggunakan cara analisis kualitatif melalui metode yang bersifat deskriptif analisis

¹⁶ Siti Rahayu, “*Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Untuk Mensejahterakan Masyarakat Perspektif Politik Islam*”, (Skripsi jurusan hukum Pidana dan Politik Islam IAIN Purwokerto), h.8.

¹⁷ *Ibid*, 15.

¹⁸ Lisa Oktavia, “*Tinjauan Fiqh Siyasah Dan Undang-Undang Desa Terhadap Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan*”, (Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung), h.18.

yang menghasilkan metode induktif yaitu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa peran Kepala Desa (pekon) Penggawa V Ulu Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir barat dalam pelaksanaan pembangunan secara umum kurang optimal sehingga kurang amanah dan bertanggung jawab terhadap tugasnya. Persamaan penelitian ini dan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang tanggung jawab terhadap peran Kepala Desa serta amanah seorang pemimpin dalam menjalankan tugasnya, perbedaan penelitian ini dan penelitian penulis adalah penelitian ini membahas tentang tanggung jawab pemimpin dalam sektor pembangunan desa yang sudah diamanatkan oleh masyarakat, sedangkan penelitian penulis membahas tentang tanggung jawab pemimpin dalam memenuhi hak-hak masyarakat kurang mampu melalui kebijakan Pengentasan Kemiskinan.¹⁹

G. Metode penelitian

Untuk menjawab persolan yang telah dirumushkan di atas, dibutuhkan metode penelitian untuk mempermudah dan memperlancar dalam pemecahan masalah tersebut Adapun metode yang digunakan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis dan sifat penelitian
 - a. Jenis penelitian

Jenis penelitian dari skripsi ini termasuk dalam penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden²⁰. Di sini penulis akan terjun ke lapangan, penulis akan meneliti peran Kepala Desa dalam mensejahterakan masyarakat desa ditinjau Siyash Dusturiyah (studi kebijakan dalam

¹⁹ *Ibid*, 19.

²⁰ Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h. 19.

pengentasan kemiskinan di desa Way Huwi Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan).

b. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini yaitu *deskriptif-analisis*, penelitian ini dengan cara menganalisis data yang diteliti dengan memaparkan data-data tersebut, kemudian diperoleh kesimpulan.

2. Data dan sumber data

Untuk membahas masalah-masalah yang ada dipenlitian ini diperlukan data, adapun cara memperoleh data sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer adalah sumber data yang dikumpulkan secara langsung oleh objek penelitian, yaitu penulis terjun langsung ke lapangan guna melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi yang diperoleh dari Kepala Desa Way Huwi Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan.

b. Data sekunder

Data yang diperoleh dari kepustakaan, dalam hal ini diperoleh melalui literatur, hasil-hasil penelitian ,peraturan perundang-undangan serta buku-buku ilmiah.

3. Populasi dan sampel

Populasi dan sampel dibutuhkan dalam penelitian untuk lebih mempermudah dalam menentukan metode penelitian yang membahas permasalahan yang sama dalam ruang lingkup dan akan memakan waktu apabila dikerjakan satu persatu.

a. Populasi

Populasi digunakan untuk menyebutkan seluruh elemen atau anggota dari seluruh wilayah yang menjadi penelitian. Populasi terdiri dari tiga elemen yaitu: tempat (place), pelaku (actors), dan aktivitas (activity) yang berintraksi secara

sinergis²¹. Yang akan menjadi populasi dalam penelitian ini adalah kepala desa, ketua RT dan masyarakat yang ada di desa Way Huwi Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan.

b. Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah satu orang kepala desa, ketua RT dan enam masyarakat desa Way Huwi Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan, sebagai narasumber, atau partisipan, informan, teman dan guru dalam penelitian yang dipilih tidak secara acak.²²

4. Metode pengumpulan data

a. Metode wawancara

Metode wawancara adalah metode pengumpulan data yang dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan masalah, tujuan dan hipotesis penelitian²³. Dalam masalah ini akan dilakukan wawancara dengan Kepala Desa Way Huwi beserta staff dan beberapa warga.

b. Metode observasi

Pada hal ini metode observasi yang digunakan observasi partisipasi. Yaitu metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan dimana observer atau peneliti benar-benar terlibat dalam keseharian responden.

c. Metode dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tersimpan dalam bentuk tulisan dan gambar serta karya-karya monumental dari seseorang. Hasil observasi dan wawancara akan lebih lengkap apabila didukung oleh dokumentasi yang menghimpun tentang situasi atau permasalahan yang akan diteliti.

²¹ Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung :CV Alfa Beta. 2008), h.49.

²² *Ibid*, 50.

²³ Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), h. 54.

5. Metode pengelolaan data

Setelah data diperoleh, maka penyusun melakukan pengelompokan untuk selanjutnya dilakukan pengeditan data agar sesuai dengan permasalahan yang akan di kaji sehingga setelah pengelolaan data siap dipakai untuk dianalisis.

6. Teknik analisis data

Analisis data dilakukan dengan metode reduksi data

a. Reduksi data (reduction)

Reduksi data merupakan penyajian data yang dihasilkan dari studi lapangan yaitu berupa hasil wawancara terhadap informan serta masyarakat dikumpulkan dan deskripsikan dalam bentuk tulisan secara jelas dan terperinci.²⁴

H. Kerangka Teoritik

Peran adalah suatu alur perilaku yang diharapkan dari seseorang atau kelompok berdasarkan posisi sosial, baik secara formal maupun informal.

Kepala Desa adalah pejabat pemerintahan Desa yang mempunyai wewenang, kewajiban, untuk menyelenggarakan pemerintahan Desa sesuai dengan tugas dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Sejahtera artinya peningkatan mutu-hidup suatu masyarakat dengan terpenuhinya kebutuhan pokok yang terdiri dari pangan, sandang dan perumahan atau pemukiman. Menurut Goulet sedikitnya tiga nilai yang terkandung di dalam kesejahteraan, yang yaitu tercapainya *swasembada* dalam arti masyarakat mampu memenuhi kebutuhan dasar. Yang kedua peningkatan harga diri dalam arti masyarakat merasa percaya diri untuk hidup mandiri dengan tidak tergantung kepada pihak lain. Yang ketiga diperolehnya suasana kebebasan dalam arti adanya kesempatan dan kemampuan untuk mengembangkan mutu hidup tanpa adanya rasa takut dan tertekan dari pihak lain.²⁵

²⁴Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum* (Bandung : Refika Aditama,2018),h.163.

²⁵ *Ibid*, 3.

Siyasah Dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas perundang-undangan Negara. Siyasah dusturiyah juga membahas hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga Negara, serta hak-hak warga Negara yang wajib dilindungi.²⁶

Kebijakan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan, menurut Friedrich kebijakan sebagai upaya yang selalu berhubungan dengan usaha untuk mencapai beberapa maksud atau tujuan.²⁷

Pengentasan Kemiskinan merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat di dalam lapisan masyarakat dengan kondisi tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.²⁸

Desa Way Huwi merupakan desa yang dibentuk pada tahun 1937 pada masa penjajahan Belanda. Desa Way Huwi termasuk ke dalam salah satu dari 21 desa di wilayah kecamatan Jati Agung Lampung Selatan.

Berdasarkan beberapa pengertian dari istilah-istilah di atas maka dapat disimpulkan yang dimaksud dengan judul skripsi ini sebagai kajian pembahasan yang meneliti tentang peran Kepala Desa dalam mensejahterakan masyarakat desa ditinjau Siyasah Dusturiyah (studi terhadap kebijakan pengentasan kemiskinan di Desa Way Huwi Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan).

²⁶ *Ibid*, 177.

²⁷ *Ibid*, 16.

²⁸ *Ibid*, 29.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Konsep Siyasah Dusturiyah

1. Pengertian Siyasah Dusturiyah

Fiqh siyasah adalah sebuah ilmu tata Negara islam yang secara terperinci membahas tentang bagaimana seluk-beluk pengaturan kepentingan manusia secara umum dan Negara secara khusus, dengan berupa penetapan hukum, peraturan serta kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan syariat ajaran islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia, serta bertujuan untuk menghindarkan dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang di jalananinya.²⁹

Menurut abdurrahman taj, klasifikasi kajian fiqh siyasah di bagi menjadi tujuh macam, yakni: (1) *siyasah dusturiyah*; (2) *siyasah tasyri'yyah*; (3) *siyasah qadha'iyah*; (4) *siyasah maliyyah*; (5) *siyasah idariyyah*; (6) *siyasah tanfidziyyah*, dan (7) *siyasah kharijiyyah*³⁰. Pada permasalahan penelitian yang ingin penulis teleti, penulis menggunakan *siyasah dusturiyah* sebagai tinjauan landasan berfikir, karena siyasah dusturiyah merupakan cabang ilmu fiqh siyasah yang sesuai dengan program studi penulis.

Siyasah Dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas tentang perundang-undangan Negara. Di dalam cabang ilmu ini membahas tentang konsep-konsep konstitusi (undang- undang dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan suatu Negara),serta legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), cabang ilmu ini juga membahas tentang bagaimana lembaga

²⁹ Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta, Erlangga, 2008) h. 11.

³⁰ *Ibid*,17.

demokrasi dan syura yang menjadi sebuah pondasi penting dalam perundang-undangan.³¹

Siyasah dusturiyah berasal dari kata “*dusturi*” yang berasal dari akar bahasa Persia. *Dusturi* sendiri memiliki makna yang berarti seseorang yang memiliki sebuah otoritas, baik itu mencakup otoritas dalam bidang politik ataupun juga mencakup dalam bidang agama. Seiring dengan perkembangan zaman, kata *dusturi* ditujukan untuk orang yang menjadi pemuka agama zoroaster (Majusi). Setelah itu kata *dusturi* diserap ke dalam bahasa Arab, sehingga kata *dusturi* berubah dari yang sebelumnya adalah orang yang mempunyai otoritas menjadi asas dasar atau pembinaan. Menurut istilah, *dustur* adalah kumpulan petunjuk yang di dalamnya terdapat dasar-dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat di dalam sebuah wadah yang disebut sebagai negara, baik itu negara yang dikategorikan sebagai negara yang tidak tertulis (konvensi) dan juga negara yang dikategorikan sebagai negara yang tertulis (konstitusi).³²

Di dalam kurikulum Fakultas Syariah itu sendiri digunakan istilah Fiqh *dusturi*, yang dimaksud dengan *dusturi*:

الدستور : القواعد الآساسة للحكم في أية كما تدل عليها
قوانينها ونظمها وعاداته.

*“Dustur adalah prinsip pokok bagi pemerintahan negara manapun seperti terbukti di dalam perundang-undangannya, peraturan-peraturannya, dan adat-adatnya”.*³³

Abdul a’la al-maududi menakrifkan *dustur* dengan:

³¹ *Ibid.*177.

³² Ahmad Rizaldin Zamri, “Implementasi Demokrasi Di Era Reformasi Di Indonesia Menurut Perspektif siyasah Dusturiyah” (Skripsi, Lampung: UIN Raden Intang Lampung, 2019),16-17.

³³ Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemasalahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group,2009).h.52.

صك ينطوى على القواعد الأساسية يقوم عليها نظام دولة.

“suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip yang pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara”.³⁴

Menurut Abdul Wahab Khallaf fiqh Siyasah Dusturiyah secara terminologi,³⁵ adalah seperangkat aturan perundang-undangan yang dibuat dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan suatu kaum atau umat dengan tujuan mengatur keadaan. Dengan demikian pengertian siyasah adalah segala perbuatan yang memiliki tujuan untuk membawa umat lebih dekat dengan kemaslahatan dan menjauhkan kepada kemafsadatan, baik Rasulullah tidak menetapkannya atau bahkan Allah Ta’ala tidak menentukannya³⁶.

Setelah menafsirkan pengertian Fiqh Siyasah Dusturiyah baik secara etimologi maupun terminologi sehingga dapat diambil sebuah pengertian bahwa Fiqh Siyasah Dusturiyah adalah salah satu kajian hukum Islam yang di dalamnya meliputi pengaturan yang berluang lingkup terhadap kegiatan kemaslahatan yang mencakup kepentingan umat manusia dalam bermasyarakat dan bernegara.

2. Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah

Setelah penulis telah menjabarkan uraian tentang pengertian Siyasah Dusturiyah, kali ini penulis akan membahas tentang bagaimana ruang lingkup Siyasah Dusturiyah, adapun pembahasan tersebut akan diuraikan di bawah ini.

Fiqh Siyasah Dusturiyah adalah bidang yang mencakup tentang hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak yang lain, serta kelembagaan yang ada di dalam masyarakat. Fiqh siyasah dusturiyah sendiri memiliki ruang lingkup yang sangat luas.

³⁴ *Ibid*, 53.

³⁵ Abdul Wahab Khallaf, *Politik Hukum Islam* (Jakarta : Tiara wacana,1994),h.7.

³⁶ *Ibid*, 8.

Adapun menurut H.A.Djazuli disiplin ilmu kajian fiqh Siyasah Dusturiyah meliputi:

1. Persoalan dan ruang lingkup (pembahasan);
2. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya;
3. Persoalan rakyat, statusnya, dan hak-haknya;
4. Persoalan bai'at;
5. Persoalan waliyul ahdi;
6. Persoalan perwakilan;
7. Persoalan ahlul halli wal aqdi;
8. Persoalan wizarah dan perbandingannya.³⁷

Setelah mengetahui bagaimana kajian ruang lingkup Fiqih Siyasah Dusturiyah dapat kita pahami bahwa Fiqh Siyasah Dusturiyah itu sendiri berfokus tentang bagaimana sebuah negara mengatur hubungan timbal balik kepada masyarakat dengan tujuan untuk mencapai keadaan yang diharapkan. Baik itu hubungan antara kelembagaan negara terhadap lembaga yang lain, maupun hubungan antara lembaga terhadap masyarakat dan juga hubungan sesama masyarakat. Selain meliputi kegiatan timbal balik secara intern, Siyasah Dusturiyah juga meliputi kegiatan timbal balik terhadap ekstern, dengan menjaga hubungan anatara negara yang lain di dalam bidang sendi-sendi kehidupan.³⁸ Sehingga kita dapat memahami secara garis besar kajian Fiqih Siyasah Dusturiyah berkecimpung terhadap pengaturan.

Fiqh Siyasah Dusturiyah itu sendiri adalah Siyasah yang berkaitan dengan peraturan dasar yang di dalamnya mengatur tentang bentuk pemerintahan serta batasan-batasan kekuasaannya. Siyasah Dusturiyah juga membahas tentang bagaimana cara pemilihan (kepala negara). Serta bagaimana batasan yang di perbolehkan untuk melaksanakan urusan umat, dan ketetapan yang menyangkut tentang hak-hak yang wajib sebagai individu dan

³⁷ *Ibid*, 47.

³⁸ *Ibid*, 45-46.

masyarakat, begitu juga mencakup tentang bagaimana hubungan penguasa dan rakyat³⁹.

Di dalam buku syllabus fakultas syariah di sebutkan ada empat bidang ilmu Fiqh Siyasah, salah satunya adalah Siyasah Dusturiyah yang menjadi fokus landasan teori penelitian yang penulis kaji.

Siyasah Dusturiyah juga mencakup kedalam beberapa bidang lagi. Adapun bidang Siyasah Dusturiyah mencakup Siyasah Tasyri'iyah Syariah (siyasah penetapan hukum yang sesuai dengan syariat), Siyasah Qadhaiyah Syari'iyah (siyasah peradilan menurut syariat), Siyasah Idariyah Syari'iyah (siyasah administrasi yang sesuai menurut syariat), dan Siyasah Tanfidziyah Syari'iyah (siyasah pelaksanaan syariat).⁴⁰

B. Teori Kepemimpinan

Seiring dengan perubahan zaman pemimpin yang dulu hanya sebatas orang yang memimpin suatu kelompok atau desa dalam menuju kemakmuran berubah menjadi sebagai sebuah profesi. Profesi sendiri adalah sebuah elemen fungsional di dalam masyarakat. Lewat profesi-berbagai profesi kita sebagai anggota di dalam masyarakat diharapkan dapat berbagi dan bisa memberikan manfaat bagi masyarakat yang lainnya, dikarenakan kita sebagai umat manusia diharapkan dapat menolong kepada sesama lewat profesi yang kita emban⁴¹. dalam hal ini profesi yang menjadi landasan penelitian ini adalah kepala desa sebagai objek penelitian.

Al-Quran sendiri telah menyinggung tentang Khalifah (pemimpin), lewat dua ayat yang terkandung di dalam Al-Quran yang pertama adalah, Q.S. Al-Baqarah: 30,

³⁹ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), h.40.

⁴⁰ *Ibid*, 40.

⁴¹ Budi Hardiman, *Filsafat Untuk Para Profesional* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2019), h.8.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً ۖ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِیْهَا
 مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا وَیَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ
 اِنِّیْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۳۰﴾

Artinya: “ Dan (ingatlah) ketika tuhanmu Berfirman Kepada malaikat, “Aku hendak menjadikan Khalifah di bumi.” Mereka berkata “ Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-mu dan menyucikan nama-mu?” dia berfirman “sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” (Q.S. Al-Baqarah:30)

Ayat yang kedua:

یٰۤاٰدَمُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِیْفَةً فِی الْاَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا
 تَتَّبِعِ الْهَوٰی فِیْضَلَّكَ عَنْ سَبِیْلِ اللّٰهِ ۚ اِنَّ الَّذِیْنَ یَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِیْلِ اللّٰهِ
 لَهُمْ عَذَابٌ شَدِیْدٌۢ بِمَا نَسُوْۤا یَوْمَ الْحِسَابِ ﴿۳۱﴾

Artinya : “(Allah berfirman), “wahai Dawud! Sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.” (Q.S. Sad:26)

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa kata khilafah digunakan Al-Quran merujuk kepada orang-orang yang mengemban kekuasaan untuk mengelola suatu wilayah, baik wilayah yang luas maupun wilayah yang terbatas. Di dalam hal ini Daud AS diberikan tugas untuk mengelola wilayah palestina, sedangkan Adam AS

diberikan tugas untuk mengelola bumi dan keseluruhannya pada awal masa sejarah manusia. Setelah itu M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa seorang khalifah juga dapat berpotensi, bahkan secara aktual, dapat melakukan hal-hal yang keliru, dan juga dapat salah jika mengikuti hawa nafsu. Oleh karena itu Allah SWT telah memberikan peringatan kepada Adam AS dan Daud AS untuk tidak mengikuti hawa dan nafsu. (lihat Q.S.20:16 dan Q.S.38 :26).⁴²

Di dalam pandangan Al-Quran, seorang pemimpin yang diberikan mandat oleh masyarakat dikategorikan sebagai seseorang yang telah menerima sebuah amanah, sedangkan masyarakat adalah sebagai pemberi amanah. Agama Islam sendiri tentu saja sudah meperingatkan bahwa penerima amanah, pada saatnya nanti akan mempertanggung jawabkan amanahnya kepada si pemberi amanah, yaitu pada “ pengadilan” di kehidupan dunia, maupun kelak saat berada di pengadilan Allah SWT di padang Mahsar⁴³.

Pemimpin adalah tokoh atau elite anggota pada sistem sosial di dalam masyarakat, yang dikenal dan juga berupaya dalam mempengaruhi para pengikutnya secara langsung maupun secara tidak langsung. Kepemimpinan juga merupakan proses seorang pemimpin menciptakan serangkaian visi, di dalam interaksi yang saling mempengaruhi tersebut, antara pemimpin dan pengikutnya bertujuan untuk merealisasikan visi.⁴⁴

1. Profil kepemimpinan Rasulullah Shallallahu'alaihi wassalam.

Nabi Muhammad SAW merupakan pengejawantahan Al-Qur'an, maka orang yang tidak mengenali Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya dia tidak dapat mengenali Nabi Muhammad SAW, tanpa memahami isi dari Al-Qur'an. Segala sesuatu hal seperti anjuran, perintah dan perilaku yang terpuji yang terkandung di Al-

⁴² Ayi Sofyan, *Etika Politik Islam* (Bandung : CV Pustaka Setia,2012),h.335.

⁴³ *Ibid*, 337.

⁴⁴ Wirawan, *Kepemimpinan,Teori,Psikologi,Prilaku Organisasi, Aplikasi Dan Penelitian* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013),h.9.

Qur'an seperti amal saleh, takwa, menegakan hal kebenaran, memerangi hal yang zalim, membantu kaum yang lemah, berlaku adil, jujur, berkata yang benar, amar ma'ruf nahi munkar dan yang lainnya. Hal-hal yang telah disebutkan telah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW, sebagai manusia paling sempurna secara istiqomah, dan segala hal yang telah dilarang oleh Al-Qur'an telah dijauhinya secara istiqomah.

Selain Nabi Muhammad Saw telah mencontohkan bagaimana umatnya harus menjauhi larangan yang sudah terkandung di Al-Qur'an, ketika dihadapkan pada situasi tertentu Nabi Muhammad Saw tidak hanya memberikan sekedar perintah tetapi dia juga ikut mengawali dan mencontohkan bahkan membantu pelaksanaan perintah tersebut.⁴⁵

Nabi Muhammad SAW adalah seorang sosok pemimpin yang tidak tahan melihat penderitaan umatnya baik di dunia maupun di akherat. Nabi selalu berpesan kepada umatnya agar tidak henti-hentinya untuk menolong kepada mereka yang membutuhkan pertolongan seperti menyantuni fakir miskin, janda, anak yatim, kaum dhu'afa. Nabi Muhammad SAW selalu menganjurkan amar mak'ruf nahi mungkar.

Hal ini berbanding terbalik dengan wakil rakyat yang enggan turun ke salah satu wilayah yang berdampak suatu bencana, contohnya adalah banjir. Pada saat banjir melanda beberapa wilayah di Indonesia, menimbulkan beberapa masalah sosial, seperti kelaparan yang disebabkan oleh banjir tersebut, kita dapat melihat betapa angkuhnya respon dari politisi serta para pemimpin yang tidak bergeming ketika melihat rakyatnya dihadapkan oleh penderitaan bencana banjir. Justru para politisi menambah luka pada masyarakat dengan memberikan statement yang menyatakan bahwa, keadaan musibah banjir bukan hanya melanda Indonesia, tetapi juga melanda negara-negara yang lain.

⁴⁵ Veithzal Rivai, Bacjtjar, Boy Rafli Amar, *Pemimpin Dan Kepemimpinan Dalam Organisasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h.123.

2. Indikator kepemimpinan dalam Islam

Seorang pemimpin adalah gambaran yang menentukan tentang suatu umat atau bangsa. Hal itu dapat menentukan tentang bagaimana sebuah negara menjadi negara yang maju atau mundur, hal ini bisa dilihat tentang bagaimana seorang pemimpin dalam memihak kepada kepentingan dirinya sendiri pasti masyarakat yang berada dalam naungannya menjadi terlantar. Sedangkan ketika seorang pemimpin tersebut lebih memilih untuk mengenyampingkan kepentingannya sendiri dan lebih mengutamakan kepentingan rakyatnya maka pasti keadilan dia tegakkan.

Adapun indikator kepemimpinan di dalam Islam yang diharapkan ketika seseorang pemimpin memilikinya maka kepemimpinan tersebut memiliki dampak yang baik terhadap kemaslahatan umat;

- a) Bertanggung jawab;
- b) Memiliki integritas tinggi;
- c) Takwa;
- d) Keteladanan;
- e) Integritas masyarakat;
- f) Membina integritas;
- g) Pemimpin yang penuh teladan.⁴⁶

3. Peran Pemimpin Dalam Pengambilan Keputusan.

Sudah sejak dulu diketahui bahwa peran kepemimpinan ada dua yang masing-masing berbeda. Kepemimpinan dibagi menjadi dua bagian, yaitu peran kepemimpinan dalam mengerjakan sesuatu yang *baik* dan *benar* hal ini mengarahkan tentang bagaimana visi dan arah. Bagian kedua adalah tentang peranan dalam mengatur dalam mengerjakan hal secara benar, atau implementasi. Dalam hal ini implementasi yang dibahas adalah tentang bagaimana dinamika organisasi, oleh sebab itu peran kepemimpinan tidak terlepas dari pembagiannya serta keterkaitan pada aspek-aspek dalam

⁴⁶ *Ibid*, 231.

pengambilan keputusan, serta mengelola konflik, dan juga membangun keutuhan tim.

Covey membagi peran pemimpin menjadi tiga bagian, yaitu:

- a) *Patchfinding* (pencarian alur); di bagian ini pemimpin diharapkan mampu untuk menentukan seperangkat visi dan misi yang jelas.
- b) *Aligning* (penyelaras); pemimpin sebagai seorang yang berperan dalam memastikan struktur, sistem dan proses oprasional dalam organisasi memberikan suport terhadap pencapaian visi dan misi.
- c) *Empowering* (pemberdaya); sebagai seorang pemimpin dibutuhkan peran yang menggerakkan semangat bawahannya, dalam mengeluarkan bakat, kecerdikan dan juga kreativitas dalam mengerjakan hal apapun dan secara konsisten terhadap segala prinsip-prinsip yang sudah disepakati bersama.⁴⁷

C. Tingkat Kemiskinan Sebagai Parameter Kesejahteraan Masyarakat.

Kemelaratan dunia ketiga telah menjadi sebuah masalah sosial yang besar yang dihadapi oleh umat manusia pada zaman ini. Di setiap relung hati manusia telah menyadarinya, namun upaya untuk mencari sumber permasalahan tersebut dibutuhkan jalan yang berbeda-beda untuk menempuh itu semua.

Perlu diketahui bahwa sudah hampir tiga puluh tahun lamanya negara-negara yang termasuk ke dalam negara miskin diberi bantuan oleh negara-negara yang di kategorikan ke dalam negara yang makmur. Sudah ratusan miliar dolar telah mengalir ke negara-negara berkembang. Tahun demi tahun, bank dunia beserta badan-badan PBB dan juga pemerintahan dari berbagai penjuru negeri telah mencoba untuk membuktikan keberhasilannya lewat angka pertumbuhan dan volume industri dan perdagangan.

⁴⁷ *Ibid*, 391.

Hampir di semua negara yang masuk ke dalam kategori negara berkembang, hanya 10,20 atau setidaknya paling banyak 30 persen penduduk dapat menikmati hasil yang didapat dari pembangunan yang telah berlangsung selama 30 tahun di bawah naungan bendera “bantuan pembangunan”. Sisa dari jumlah persentase yang telah menikmati pembangunan, mayoritas h tidak lebih baik dari masa-masa awal dari era pembangunan. Lebih parahnya lagi lapisan terbawah dari masyarakat yang jumlahnya mencapai ratusan juta malah semakin melarat.

Menurut Rudolf H. Strahm strategi pembangunan yang diimplementasikan dewasa ini tidak menyumbang apapun bagi kesejahteraan masyarakat miskin, malah sebaliknya membuat mereka bertambah sengsara. Publikasi-publikasi yang terkenal dan angka-angka parameter resmi sekalipun, tidak pernah mau mengungkapkan bahwa kesenjangan sosial di Indonesia semakin melebar, karena di anggap masalah yang dapat mengotori hubungan diplomatik.⁴⁸

Perlu kita ketahui, jika ingin membahas tentang masalah yang terjadi tentang kesejahteraan masyarakat, ada baiknya untuk mengetahui lebih dulu apa itu struktur di dalam masyarakat. Salah satu segi dari sebuah kebudayaan manusia yaitu hal-hal yang berhubungan dengan pengelompokan warga masyarakat, yang terbagi dalam pengelompokan. Dikarenakan manusia sejak dia dilahirkan ke dunia, mereka sudah langsung tercakup dalam satu jenis kelompok yang ada secara menyeluruh berupa keluarga. Manusia sudah termasuk kedalam kelompok tersebut secara biologis. Dan keluarga-keluarga tersebut berdiam di daerah tertentu secara berdekatan dan bersama-sama, sehingga tercakup ke dalam desa.⁴⁹

Menurut Selo Soemardjan dan Soelaeman soemardi struktur sosial adalah petunjuk sosial atau biasa disebut sebagai norma-norma sosial, lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok sosial dan juga beserta

⁴⁸ Rudolf H. Strahm, *Kemiskinan Dunia Ketiga Menelaah Kegagalan Pembangunan di Negara Berkembang*, (Jakarta : PT pustaka CIDESINDO,1999),h.6.

⁴⁹ Ihromi, *Pokok-pokok Antropologi Budaya*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,2006),h.82.

lapisan-lapisan sosial. Di katakan bahwa yang menonjol dari sebuah struktur sosial yang ada lapisan-lapisan sosial atau stratifikasi sosial.⁵⁰

Stratifikasi sosial itu sendiri bisa diidentifikasi sebagai corak perbedaan anggota di dalam masyarakat, yang menjadi parameter penilaian melalui status sosial yang dia miliki. Sedangkan menurut Pitrim A.Sorokin stratifikasi sosial adalah perbedaan atau pengelompokan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas yang bertingkat (hierarkis), yang meliputi ke dalam kelas tinggi, menengah dan rendah.⁵¹

Struktur masyarakat memiliki kelas-kelas sosial, telah menimbulkan masalah sosial yang terjadi. Menurut Soekanto, para ahli berpendapat bahwa masalah sosial adalah suatu kondisi atau perkembangan yang tercipta di dalam masyarakat yang berdasarkan kepada studi yang dilakukan mempunyai ciri yang dapat menimbulkan kekacauan terhadap kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Masalah sosial sendiri tercipta karena perbedaan mencolok antara nilai dalam masyarakat dengan realita yang ada. Masalah sosial juga dapat dikategorikan ke dalam 4(empat) jenis faktor, yakni: (1) faktor ekonomi, yang meliputi kemiskinan, pengangguran, dan lain-lain;(2) faktor budaya meliputi, perceraian, kenakalan remaja, dan lain-lain; (3) faktor biologis meliputi, penyakit menular, keracunan makanan dan sebagainya; (4) faktor psikologis meliputi, meliputi syaraf aliran sesat dan sebagainya.⁵²

Masalah sosial seperti kesenjangan sosial yang tercipta antara kelas tinggi dan kelas rendah yang disebabkan oleh tingginya angka kemiskinan di Indonesia. Kemiskinan sendiri telah mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut. Kemiskinan tidak timbul dengan sendirinya, kemiskinan dipengaruhi oleh faktor-faktor pendorong munculnya kemiskinan itu sendiri. Namun sebelum membahas faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan, ada baiknya kita mengetahui

⁵⁰Philipus, Nurul aini, *Sosiologi dan Politik* (Jakarta: PT RAJA GRAFINDO PERSADA, 2011),h.35.

⁵¹ *Ibid*,36.

⁵² Ida Bagus Made Astawa, *Pengantar Ilmu Sosial*, (Depok: PT RAJA GRAFINDO PERSADA, 2017),h.55.

lebih dulu apa itu kemiskinan, kenapa kemiskinan dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat.

Suparlan menjabarkan tentang kemiskinan, menurutnya kemiskinan adalah di mana individu atau secara kelompok, memiliki keadaan yang serba kekurangan baik berupa harta dan benda yang mereka derita. Mereka hidup di kawasan miskin yang serba kekurangan atau kekurangan modal, yang dapat diartikan kekurangan dalam bentuk uang, pengetahuan, kekuatan sosial, politik, hukum maupun akses terhadap fasilitas pelayanan publik, dan juga mereka kurang dalam memiliki kesempatan untuk berusaha dan bekerja. Lebih jauh lagi, kemiskinan dapat diartikan sebagai suatu keadaan orang atau juga kelompok tidak mempunyai kemampuan, kebebasan, aset dan aksesibilitas untuk memenuhi kebutuhan mereka untuk masa yang akan datang, dan mereka juga mudah untuk menerima resiko yang diakibatkan oleh penyakit, mereka juga mudah untuk mendapatkan tekanan akibat peningkatan secara tiba-tiba atas bahan pokok kehidupan dan juga biaya pendidikan sekolah.⁵³

Menurut Nugroho dan Dahuri, kemiskinan merupakan sebuah keadaan yang absolut atau relatif di suatu wilayah seseorang atau kelompok yang ada di dalam masyarakat, tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya dasar, yang sesuai dengan kaidah tata nilai dan juga norma yang berlaku di masyarakat tersebut. Jika dilihat dalam pandangan ekonomi, maka kemiskinan itu menunjuk kepada gap antara lemahnya *purchasing power* dan rasa keinginan dalam memenuhi segala kebutuhan yang mendasar.⁵⁴

Kemiskinan di Indonesia memiliki tipe-tipe dalam penggolongan. Hal ini bukanlah tanpa sebab, pengelompokan tersebut bertujuan untuk memperjelas sasaran dan juga target pada setiap program. Sumodiningrat (1999) membagi kemiskinan dalam tiga kategori, yaitu:

⁵³ Yoghi Citra Pratama, “ Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Indonesia”. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen* 4, no.2 (2014): 213.

⁵⁴ Ayu Setyo Rini , Lilik Sugiharti, “ Faktor-Faktor Penentu Kemiskinan Di Indonesia: Analisis Rumah Tangga”. *Jurnal Ekonomi Terapan* 1, no.2 (2016):19.

1. Kemiskinan absolut (Pendapatan di bawah garis kemiskinan dan tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan dasarnya).
2. Kemiskinan relatif (Situasi kemiskinan di atas garis kemiskinan berdasarkan pada jarak antara miskin dan non miskin di dalam suatu komunitas).
3. Kemiskinan struktural (kemiskinan ini terjadi saat orang atau suatu kelompok masyarakat, enggan untuk memperbaiki kondisi kehidupannya sampai ada bantuan yang mendorong mereka keluar dalam kondisi tersebut).⁵⁵

Kemiskinan sendiri telah menjadi masalah sosial di Indonesia, namun kemiskinan tidak tumbuh dengan sendirinya, kemiskinan juga memiliki faktor-faktor dan penyebab terjadinya kemiskinan. Berikut penulis akan menjabarkan penyebab kemiskinan menurut para ahli. Menurut Arsyad , kemiskinan terjadi di suatu lapisan masyarakat, disebabkan anggota masyarakat tersebut tidak mampu dalam kepemilikan faktor produksi dan juga kualitas yang tidak memadai.

Menurut Sen dalam Todaro dan Smith, kemiskinan bukanlah suatu kondisi di mana individu dan kelompok kekurangan komoditi ataupun masalah terhadap rasa kepuasan terhadap komoditi tersebut, akan tetapi kemiskinan tersebut memiliki kecenderungan terhadap kondisi masyarakat kurang dalam memaksimalkan terhadap fungsi dan juga manfaat dari komoditi tersebut. Selain itu menurut Dowling dan Valenzuela, keadaan masyarakat menjadi miskin disebabkan oleh rendahnya modal manusia, yang meliputi pendidikan, pelatihan dan juga kemampuan dalam membangun. Masyarakat juga sedikit dalam memiliki modal fisik yang jika dijumlah sangat kecil. Lebih lanjut, jika mereka memiliki modal manusia dan fisik yang baik, mungkin mereka juga tidak memiliki kesempatan dalam bekerja yang disebabkan adanya diskriminasi⁵⁶.

⁵⁵ *Ibid*, 214.

⁵⁶ *Ibid*, 20.

Menurut Haughton dan Khandker penyebab-penyebab yang utama atau juga yang berhubungan terhadap kemiskinan di negara yang dikategorikan sebagai negara yang berkembang memiliki tiga ciri khas. Yang diartikan ke dalam tiga ciri khas tersebut meliputi, wilayah, masyarakat, serta rumah tangga dan individu. Karakteristik wilayah mencakup kedalaman kerentanan terhadap bencana alam, seperti banjir dan angin topan, serta keterpencilan suatu wilayah, dan kualitas terhadap suatu pemerintahan beserta hak milik dan pelaksanaannya. Karakteristik masyarakat meliputi ketersediaan infrastruktur (Jalan, air, listrik), pada ciri masyarakat juga meliputi indikator pelayanan (kesehatan, pendidikan), juga meliputi kedekatan terhadap akses pasar dan hubungan sosial. Karakteristik rumah tangga dan individu dilihat dari demografi, ekonomi dan juga aspek sosial.⁵⁷

⁵⁷ *Ibid*, 21.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adair, John. (1994). *Menjadi Pemimpin Efektif*. Jakarta: PT Pustaka Binaman PressIndo.
- Agustino , L. (2017). *Dasar-dasar Kebijakan Publik* . Bandung : Alfabeta.
- Al-Hasyami, S. A. (2003). *Syarah Mukhtaarul Ahaadist*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Bagus Made Astawa, Ida. (2017). *Pengantar Ilmu Sosial*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Budiharjo , M. (1992). *Dasar-dasar Ilmu Politik* . Jakarta : Gramedia Pustaka Utama .
- Departemen , P. (1991). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* . Jakarta : Balai Pustaka .
- Djazuli .(2009). *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam rambu-rambu syariah*. Jakarta:Prenada Media Group.
- Hardiman, Budi. (2019). *Filsafat Untuk Para Profesional*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara
- Ihromi. (2006). *Pokok-pokok Antropologi Budaya*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Iqbal, M. (2014). *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik* . Jakarta : Pranamedia Group.
- Kartono, Kartini. (2004). *Pemimpin Dan Kepemimpinan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mardikanto , T., & soebianto , P. (2012). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Persfektif Kebijakan Publik* . Bandung: Alfabeta .

- Narbuko , C., & Acyadi, A. (1997). *Metode Penelitian* . Jakarta : Boemi Aksara .
- Philipus & Nurul Aini. (2011). *Sosiologi Dan Politik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Pulungan, Suyuthi. (1997). *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah Dan Pemikira*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rivai, Veithzal & Bacjtjar, Boy Rafli Amar. (2013). *Pemimpin Dan Kepemimpinan Dalam Organisasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Rohiman , n. (2016). *Pengantar Kesejahteraan Sosial Berwawasan Iman Dan Taqwa*. Jakarta : Rajawali Pers .
- Rudolf H & Starhm. (1999). *Kemiskinan Dunia Ketiga Menelaah Kegagalan Pembangunan Dinegara Berkembang*. Jakarta: PT pustaka CIDESINDO.
- Saifullah. (2018). *Tipologi Penelitian Hukum*. Bandung : Refika Aditama.
- Sofyan, Ayi. (2012). *Etika Politik Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Sugiyono. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- susiadi. (2014). *Metode Penelitian* . Bandar Lampung : IAIN Raden Intan Lampung.
- Syarif , M. I., & Zada, K. (2008). *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Politik Pemikiran Islam* . Jakarta: Erlangga .
- Wahab Khallaf, Abdul. (1994). *Politik Hukum Islam*. Jakarta: Tiara Wacana.
- Wirawan. (2013). *Kepemimpinan,Teori,Psikologi,Prilaku organisasi, Aplikasi Dan Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

Sumber Online

Wikipedia. (n.d.). Retrieved Agustus Senin, 2020, from Ensiklopedia Bebas: https://id.wikipedia.org/wiki/Pengentasan_kemiskinan

Skripsi

Ahmad Rizaldin Zamri “ *Implementasi Demokrasi Di Era Reformasi Di Indonesia Menurut perspektif Siyasah Dusturiyah*”(Skripsi, Lampung: Universitas Raden Intan Lampung,2019).

Lisa Oktavia “ *Tinjauan Fiqh Siyasah Dan Undang-undang Desa Terhadap Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan*”(Skripsi, Lampung : Universitas Raden Intan Lampung,2017).

Siti Rahayu “ Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Untuk Mensejahterakan Masyarakat Perspektif Politik Islam”(Skripsi, IAIN Puwekerto, 2016).

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar 1945 Pasal 34 Ayat (1)

Undang-undang Dasar 1945 Pasal 26 ayat (4)

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 Pasal (3) Tentang Penanganan Fakir Miskin.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 25 Tentang Desa.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (5) Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 101 Tentang Pemerintah Desa.

Peraturan Menteri Desa Nomor 6 2020 Tentang Peraturan Pengganti perubahan atas permendesa PDTT 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Artikel

Citra Pratama, yoghi. (2014). Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, Vol.4, No.2, 213

Rodiah Nur, Efa. (2017) . Dialektika Ilmu Hukum Indonesia Dalam Domiasi Positivisme Ilmu Hukum(Suatu Pergeseran Paradigma Ilmu Hukum Indonesia Dari Teks Menuju Realitas Hukum Yang Berkeadilan)”. *Jurnal ASAS*, Vol.9, No.1, 33.

Setyo Rini, Ayu & lilik Sugiharti. (2016). Faktor-faktor Penentu Kemiskinan Di Indonesia: Analisis Rumah Tangga. *Jurnal Ekonomi Terapan*, Vol.1, No.2 ,19.

Surkati, A. (2012). Otonomi Daerah Sebagai Instrumen Pertumbuhan Kesejahteraan Dan Peningkatan Kerja Sama Antar Daerah. *Jurnal Mimbar*, 28, No.1, 1.